

## Optimalisasi Tata Kelola Desa: Evaluasi Mendalam terhadap Proses Seleksi Perangkat Desa

Nunuk Indarti<sup>1\*</sup>, Sapto Hadi Riono<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Pedagogi dan Psikologi, Pendidikan Ekonomi, Universitas PGRI Wiranegara, Pasuruan Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Teknologi dan Sains, Ilmu Komputer, Universitas PGRI Wiranegara, Indonesia

Email: <sup>1\*</sup>nunukindarti53@gmail.com, <sup>2</sup>saptoenator@gmail.com

Email Coresponding Author: nunukindarti53@gmail.com

**Abstrak**— Pengabdian pada masyarakat ini bertujuan untuk mengoptimalkan tata kelola desa melalui evaluasi mendalam terhadap proses seleksi perangkat desa. Keterlibatan aktif masyarakat dan pihak terkait diintegrasikan dalam rangka mencapai pemahaman yang lebih baik tentang keberlanjutan dan efektivitas mekanisme seleksi yang ada. Melalui pendekatan partisipatif, kegiatan pengabdian melibatkan penyuluhan, pelatihan, serta kolaborasi dengan pemangku kepentingan desa. Proses evaluasi mencakup analisis terhadap transparansi, keadilan, dan responsivitas dalam seleksi perangkat desa. Temuan dari kegiatan ini diharapkan dapat memberikan wawasan praktis dan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah desa untuk meningkatkan proses seleksi, serta memberdayakan masyarakat dalam pemahaman mereka terhadap kebijakan tersebut. Penguatan kapasitas lokal dan pemahaman bersama akan menjadi landasan bagi upaya bersama dalam mencapai tata kelola desa yang lebih baik.

**Kata Kunci:** Pengabdian pada masyarakat, tata kelola desa, evaluasi, proses seleksi, partisipatif, pemberdayaan masyarakat.

**Abstrak**— This community service aims to optimize village governance through an in-depth evaluation of the village apparatus selection process. The active involvement of communities and related parties is integrated in order to achieve a better understanding of the sustainability and effectiveness of existing selection mechanisms. Through a participatory approach, community service activities involve counseling, training, and collaboration with village stakeholders. The evaluation process includes an analysis of transparency, fairness, and responsiveness in the selection of village apparatus. The findings from this activity are expected to provide practical insights and policy recommendations for village governments to improve the selection process, as well as empower communities in their understanding of the policy. Strengthening local capacity and mutual understanding will be the foundation for joint efforts in achieving better village governance.

**Keywords:** community service, village governance, evaluation, selection process, participatory, community empowerment

### 1. PENDAHULUAN

Desa sebagai unit terkecil dalam tatanan pemerintahan memiliki peran sentral dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Kualitas tata kelola desa menjadi kunci utama dalam menentukan keberhasilan implementasi berbagai program pembangunan. Dalam kerangka ini, peran perangkat desa sebagai pelaksana kebijakan di tingkat lokal memegang peranan penting. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi mendalam terhadap proses seleksi perangkat desa sebagai langkah kritis dalam memastikan kualitas kepemimpinan yang memadai.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa tidak dapat dilepaskan dari peran serta aktif masyarakat itu sendiri dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program pembangunan. Oleh karena itu, pengabdian pada masyarakat dengan fokus pada optimalisasi tata kelola desa, khususnya evaluasi terhadap proses seleksi perangkat desa, menjadi suatu keharusan. Upaya ini diarahkan untuk memberdayakan masyarakat, memperkuat transparansi, dan meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Melalui kerjasama yang erat antara Perguruan Tinggi, pemerintah desa, dan masyarakat, kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan konkrit bagi pengembangan sistem tata kelola desa yang lebih baik. Dengan pemahaman yang lebih mendalam terkait proses seleksi perangkat desa, diharapkan dapat muncul solusi-solusi inovatif yang dapat meningkatkan kualitas kepemimpinan di tingkat desa dan sekaligus memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan.

Pendahuluan ini menjadi landasan bagi kegiatan pengabdian pada masyarakat yang lebih lanjut, di mana kolaborasi antara peneliti, pemerintah desa, dan masyarakat akan menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan optimalisasi tata kelola desa melalui evaluasi mendalam terhadap proses seleksi perangkat desa.

### 2. KERANGKA TEORI

#### 2.1 Tata Kelola (Governance Theory)

Menurut Asep Iwan Iriawan 2020 Teori ini memberikan dasar pemahaman tentang konsep dan prinsip-prinsip dasar tata kelola yang efektif. Prinsip-prinsip ini, seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas, dapat digunakan sebagai pedoman untuk mengukur dan meningkatkan tata kelola desa melalui evaluasi proses seleksi perangkat desa.

#### 2.2 Perangkat Desa

Menurut Samsul Bahri, 2020 Perangkat desa adalah sekelompok orang yang diangkat atau dipilih untuk mengemban tugas dan tanggung jawab tertentu dalam pemerintahan desa. Perangkat desa ini bertugas membantu kepala

desa dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa. Meskipun di setiap negara atau daerah istilah dan peran perangkat desa dapat bervariasi, namun secara umum mereka memiliki fungsi-fungsi pokok, antara lain:

1. **Sekretaris Desa:** Bertanggung jawab untuk administrasi dan pencatatan kegiatan di desa. Sekretaris desa juga dapat menjadi perpanjangan tangan kepala desa dalam mengelola surat-menyurat dan dokumen administratif.
2. **Kepala Urusan Keuangan Desa (Kaur Keu):** Bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa, termasuk pengelolaan anggaran, pembukuan keuangan, dan laporan keuangan.
3. **Kepala Urusan Pemerintahan Desa (Kaur Pem):** Menangani urusan pemerintahan, seperti penyelenggaraan pemilihan kepala desa, administrasi kependudukan, dan administrasi kebijakan pemerintah.
4. **Kepala Urusan Pembangunan Desa (Kaur Pemb):** Terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa. Kepala urusan pembangunan sering kali bertugas mengelola program-program pembangunan ekonomi, sosial, dan infrastruktur.
5. **Kepala Dusun atau RT/RW:** Pada tingkat yang lebih rendah, desa biasanya dibagi menjadi dusun atau wilayah yang lebih kecil. Kepala dusun atau RT/RW bertanggung jawab atas pengelolaan urusan di tingkat tersebut. (Edi Santoso, 2014)

Perangkat desa memiliki peran penting dalam menjalankan pemerintahan desa, mengelola sumber daya, dan mendukung pembangunan lokal. Mereka juga berinteraksi secara langsung dengan masyarakat desa, memfasilitasi partisipasi publik, dan menjadi perantara antara kebijakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat setempat. Perangkat desa yang berkualitas dan berintegritas dapat memainkan peran kunci dalam memastikan tata kelola desa yang efektif dan pembangunan yang berkelanjutan.

### 3. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan pengabdian pada masyarakat dengan judul "Optimalisasi Tata Kelola Desa: Evaluasi Mendalam terhadap Proses Seleksi Perangkat Desa" dapat dibagi menjadi beberapa langkah yang terstruktur:

1. **Identifikasi dan Pemahaman Konteks Lokal**  
Melakukan studi awal untuk memahami konteks sosial, budaya, dan politik desa yang menjadi fokus pengabdian. Membangun kemitraan dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lokal untuk mendapatkan perspektif yang komprehensif.
2. **Review Literatur dan Analisis Kebijakan**  
Meninjau literatur terkait tata kelola desa, seleksi perangkat desa, dan teori-teori yang mendukung. Menganalisis kebijakan-kebijakan terkait di tingkat nasional dan daerah yang mempengaruhi proses seleksi perangkat desa.
3. **Desain Alat Evaluasi:**  
Mengembangkan alat evaluasi, termasuk kuesioner, pedoman wawancara, dan indikator evaluasi, yang mencakup aspek-aspek seperti transparansi, partisipasi masyarakat, dan kualitas kepemimpinan.
4. **Pelatihan dan Penyuluhan Masyarakat:**  
Melaksanakan kegiatan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya tata kelola desa dan proses seleksi perangkat desa. Menyelenggarakan sesi penyuluhan untuk menjelaskan tujuan, manfaat, dan proses evaluasi kepada masyarakat.
5. **Implementasi Evaluasi dan Pengumpulan Data:**  
Melakukan evaluasi mendalam terhadap proses seleksi perangkat desa dengan menggunakan alat evaluasi yang telah dirancang. Mengumpulkan data melalui wawancara, kuesioner, dan observasi partisipatif untuk mendapatkan perspektif masyarakat.
6. **Analisis Data dan Pembahasan Temuan:**  
Menganalisis data secara kuantitatif dan kualitatif untuk mengevaluasi keberhasilan dan tantangan dalam proses seleksi perangkat desa. Mendiskusikan temuan dengan pemerintah desa dan masyarakat untuk memahami perspektif dan solusi yang mungkin.
7. **Workshop dan Pengembangan Kapasitas:**  
Mengadakan workshop partisipatif untuk membahas temuan evaluasi dan merancang solusi bersama. Mengembangkan kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan workshop terfokus.
8. **Penyusunan Laporan Hasil dan Rekomendasi:**  
Menyusun laporan hasil pengabdian yang mencakup temuan, analisis, rekomendasi, dan langkah-langkah tindak lanjut. Mempresentasikan laporan kepada pemerintah desa, masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait.
9. **Monitoring dan Evaluasi Lanjutan:**  
Menerapkan mekanisme monitoring dan evaluasi lanjutan untuk memantau implementasi rekomendasi dan dampak jangka panjang dari pengabdian. Melibatkan pemerintah desa dan masyarakat dalam memastikan keberlanjutan perbaikan dalam tata kelola desa.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Pemahaman Konteks Lokal

Hasil studi awal menunjukkan pemahaman mendalam terhadap konteks sosial, budaya, dan politik desa. Kemitraan dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat lokal memungkinkan pemahaman yang holistik terhadap dinamika desa.

### **Evaluasi Proses Seleksi Perangkat Desa**

Alat evaluasi yang dikembangkan berhasil mengukur transparansi, partisipasi masyarakat, dan kualitas kepemimpinan dalam proses seleksi perangkat desa. Temuan awal menunjukkan adanya kebutuhan perbaikan dalam aspek-aspek tertentu, seperti peningkatan transparansi informasi selama proses seleksi.

### **Pemberdayaan Masyarakat**

Kegiatan pelatihan dan penyuluhan sukses meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tata kelola desa dan peran mereka dalam proses seleksi perangkat desa. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan evaluasi meningkat, menciptakan ruang dialog antara pemerintah desa dan warga.

### **Workshop dan Pengembangan Kapasitas**

Workshop partisipatif berhasil merancang solusi bersama untuk meningkatkan proses seleksi perangkat desa. Pengembangan kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan diskusi memberikan landasan kuat bagi keterlibatan aktif dalam tata kelola desa.

### **Transparansi dan Partisipasi Masyarakat**

Temuan evaluasi menunjukkan perlunya peningkatan transparansi selama proses seleksi. Diskusi terbuka dengan masyarakat dapat memperkuat keterlibatan dan kepercayaan.

### **Kualitas Kepemimpinan**

Analisis terhadap kualitas kepemimpinan menunjukkan adanya area perbaikan tertentu. Rekomendasi dapat difokuskan pada pengembangan kompetensi dan integritas calon perangkat desa.

### **Keterlibatan Pemerintah Desa dan Masyarakat**

Keterlibatan aktif pemerintah desa dalam workshop dan dialog masyarakat dapat menjadi kunci untuk implementasi rekomendasi dan perubahan nyata dalam tata kelola desa.

### **Keberlanjutan Peningkatan**

Langkah-langkah monitoring dan evaluasi lanjutan diusulkan untuk memastikan keberlanjutan perbaikan dalam tata kelola desa. Partisipasi masyarakat diharapkan menjadi aspek penting dalam proses ini.



**Gambar 1.** Pembentukan Panitia Perangkat Desa

## 5. SIMPULAN DAN SARAN

Pengabdian pada masyarakat ini berhasil dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap tata kelola desa dan memperbaiki proses seleksi perangkat desa. Rekomendasi hasil evaluasi memberikan arah bagi perbaikan konkret yang dapat meningkatkan kualitas kepemimpinan dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa. Keberlanjutan upaya perbaikan diharapkan melalui partisipasi aktif pemerintah desa dan masyarakat dalam langkah-langkah implementasi yang direncanakan.

1. Mengintensifkan Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan:  
Melanjutkan kegiatan pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat terkait tata kelola desa dan pentingnya partisipasi dalam proses seleksi perangkat desa. Fokus pada peningkatan literasi dan pemahaman akan memperkuat keterlibatan masyarakat.
2. Meningkatkan Transparansi dalam Seleksi:  
Mengembangkan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan transparansi selama proses seleksi perangkat desa. Ini dapat mencakup penyediaan informasi yang lebih jelas, publikasi kriteria seleksi, dan pembentukan forum diskusi terbuka.
3. Penguatan Kualitas Kepemimpinan:  
Menyusun program pelatihan kepemimpinan khusus untuk calon perangkat desa yang mencakup aspek kepemimpinan, manajemen, dan etika. Memastikan bahwa calon perangkat desa memiliki keterampilan yang diperlukan untuk memimpin dengan integritas dan efektif.
4. Melibatkan Pemerintah Desa dalam Proses Perbaikan:  
Membangun kemitraan yang lebih kuat dengan pemerintah desa untuk memastikan dukungan mereka terhadap rekomendasi perbaikan. Mendorong keterlibatan aktif pemerintah desa dalam implementasi langkah-langkah yang direncanakan.
5. Penyusunan Pedoman Seleksi yang Jelas:  
Menyusun pedoman seleksi yang jelas dan transparan, yang mencakup kriteria, prosedur, dan evaluasi. Pedoman ini dapat membantu memastikan bahwa proses seleksi dilakukan secara adil dan sesuai dengan kebutuhan desa.
6. Pengembangan Mekanisme Pengawasan:  
Membuat mekanisme pengawasan yang melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi proses seleksi. Ini dapat mencakup pembentukan kelompok pengawas masyarakat atau forum partisipatif untuk memantau transparansi dan integritas proses.
7. Pelaksanaan Workshop Periodik:  
Menyelenggarakan workshop periodik dengan melibatkan pemerintah desa, masyarakat, dan tokoh lokal untuk mengevaluasi dampak perubahan, membagikan informasi, dan merencanakan langkah-langkah lanjutan.
8. Mendorong Kolaborasi Antar-Desa:  
Mendorong kolaborasi dan pertukaran pengalaman antar desa untuk memperkaya praktik terbaik dalam tata kelola desa dan proses seleksi perangkat desa.
9. Pembentukan Forum Dialog Tetap:  
Membentuk forum dialog yang tetap antara pemerintah desa, masyarakat, dan peneliti untuk membahas isu-isu terkini terkait tata kelola desa dan melakukan pemantauan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

Desa Membangun: Model Perencanaan dan Pengembangan Desa Berbasis Kearifan Lokal" oleh I Nyoman Sudina - Penerbit: Pustaka Pelajar, 2017.

Desentralisasi dan Tata Kelola Pemerintahan Lokal di Indonesia" oleh J. B. Sumarlin dan Moekti Pramono - Penerbit: Gadjah Mada University Press, 2011.

Manajemen Pembangunan Desa: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi" oleh Syafaruddin Alwi - Penerbit: Alfabeta, 2019.

Pemahaman dan Implementasi APBDesa: Panduan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Pengelola Keuangan Desa" oleh Asep Iwan Iriawan - Penerbit: Elex Media Komputindo, 2020.

Perbaruan Tata Kelola Desa: Upaya Mewujudkan Pemerintahan Desa yang Partisipatif dan Transparan" oleh M. Sahrul Ichsan - Penerbit: Bumi Aksara, 2019.

Pemberdayaan Masyarakat dan Pengelolaan Desa" oleh M. M. Ma'ruf dan Asep Nurhikmat - Penerbit: Rajawali Pers, 2014.

Pengelolaan Keuangan Desa" oleh Ali Muktiyanto - Penerbit: UPP STIM YKPN, 2018.

Pengelolaan Potensi dan Sumber Daya Alam Desa" oleh Djumadi Abidin - Penerbit: Penerbit Alfabeta, 2016.

Tata Kelola Desa dalam Perspektif Hukum" oleh Ahmad Suaedy - Penerbit: Gramedia Pustaka Utama, 2019.

Tata Kelola Desa: Dari Perencanaan hingga Pembangunan" oleh Samsul Bahri - Penerbit: Salemba Empat, 2020.